

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016

by Karnadi Karnadi

Submission date: 11-Nov-2018 09:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1036776261

File name: 5_ARTIKEL-ILMIAH-PAK-KARNADI-_KETIMPANGAN.pdf (302.81K)

Word count: 2473

Character count: 15972

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016

¹Karnadi

Karnadi68@gmail.com

²Lita Permata Sari

arta_permata@yahoo.co.id

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstract

Economic growth between different regions may have an impact on the uneven distribution of income and development. Situbondo Regency which has an area of 163,850 Ha, has 17 districts. The sub-districts in Situbondo District have different areas, natural potential, and different regional characteristics. Inequality income is a problem that can be found in any region. In general, inequality can not be destroyed, but can only be reduced to an acceptable level by a particular social system so that alignment in the system is maintained in the process of growth. Implementation of regional autonomy is expected local government able to manage regional potency maximally so that inequality of economic development, yield and income received by sub-district decreasing. This research uses williamson index analysis to measure income inequality between districts in Situbondo Regency in 2016. The result shows Williamson index value of 0.16, that is still far categorized as lame, economic growth in Situbondo Regency is still said to be evenly distributed.

Keywords: Economic Growth, Disparity (income inequality), Williamson Index

Pendahuluan

Kekhawatiran Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam pembangunan daerah harus dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini memerhatikan bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi antar wilayah atau suatu daerah berbeda-beda sehingga dapat memberikan dampak pada distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Di era otonomi daerah ini peran dari pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi fiskal daerah secara mandiri sehingga dapat mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik.

Pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi pada daerah – daerah lain di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo yang memiliki luas wilayah 163.850 Ha, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten Situbondo sebesar 5,00 persen

(www.Situbondokab.bps.go.id).

Kabupaten Situbondo memiliki 17 wilayah kecamatan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah yang berbeda-beda, potensi alam, dan karakteristik wilayah yang berbeda pula. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi yang tidak seragam dan tidak merata pada masing-masing wilayah kecamatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang dapat ditemukan di wilayah atau daerah mana saja. Secara umum ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Dari hal tersebut pelaksanaan otonomi daerah diharap pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah secara maksimal sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi, hasil dan pendapatan yang diterima antar kecamatan semakin menurun.

Dari sisi pembangunan daerah hal yang penting adalah pemerintah daerah mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimiliki, kemudian menganalisis sektor-sektor yang memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk yang salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli, 2008). PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir masing-masing Rp 11.640.758,6 juta (2016**), Rp 11.086.483,2 juta (2015*), Rp 10.572.373,7 juta (2014), Rp 9.993.845,7 juta (2013), dan Rp 9.411.602,8 juta (2012) (BPS, 2017). Kajian mengenai ketimpangan menjadi penting dilakukan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dinamika perekonomian di Kabupaten Situbondo sangat bergantung dari potensi

sumberdaya alam yang dimiliki seperti; pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa yang mana sangat mungkin terjadi ketimpangan ekonomi.

Kajian Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005 : 46). Sedangkan menurut Kuznet (Jhingan, 2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu daerah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan pada satu tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuropro, 2004).

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (Arsyad,1997) menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi. Dimana penerimaan pendapatan yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive).
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelestarian barang-

indeks williamson dapat diketahui sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y-Yd)^2 \cdot nd/n}}{Yd}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
 Y = PDRB per kapita Kecamatan i
 Yd = PDRB per kapita di Kabupaten Situbondo
 Nd = Jumlah penduduk Kecamatan i
 n = Jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo

Dengan kriteria penilaian yang diperoleh antara nol dan satu ($0 < IW < 1$), sebagai berikut:

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Kegiatan penelitian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 17 kecamatan dengan karakteristik yang berbeda-beda dan setiap kawasan memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda pula. Sedangkan ruang lingkup kajian materi ini meliputi: pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui hasil

barang ekspor dari negara sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Ukuran Ketimpangan

Secara umum untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kecamatan dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997). Rumus

- a. Apabila nilai indeks yang diperoleh mendekati 0 maka indikasi terjadinya ketimpangan regional (kecamatan) kecil atau pertumbuhan ekonomi merata;
- b. Apabila nilai indeks yang diperoleh mendekati 1 maka indikasi ketimpangan regional (kecamatan) besar atau pertumbuhan ekonomi tidak merata;
- c. Apabila $IW < 0,3$, artinya : Ketimpangan ekonomi wilayah rendah
- d. Apabila $IW = 0,3-0,4$, artinya : Ketimpangan ekonomi wilayah sedang
- e. Apabila $IW > 0,4$, artinya : Ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dalam pengeluaran data yaitu, Bappeda Kabupaten Situbondo, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi-intansi terkait serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian ini. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB Kabupaten Situbondo ADHK periode tahun 2012 - 2016.
2. PDRB per kapita Kabupaten Situbondo ADHK periode tahun 2012 - 2016.
3. Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2016
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Di Kabupaten Situbondo tahun 2016.

5. Potensi daerah di 17 wilayah Kecamatan (Kecamatan dalam angka) tahun 2016.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Situbondo.

Metode Analisis

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Situbondo maka dalam penelitian ini digunakan indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional atau metode untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah (Sjafrizal, 1997). Rumus indeks williamson dapat diketahui sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y-Yd)^2 \cdot nd/n}}{Yd}$$

Keterangan:

IW= Indeks Williamson

Y = PDRB per kapita Kecamatan i (menggunakan Hasil Produksi Sektor Pertanian + Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM) Kecamatan i)

Yd= PDRB per kapita di Kabupaten Situbondo

nd = Jumlah penduduk Kecamatan i

n = Jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo

Bila $IW < 0,3$, artinya :

Ketimpangan ekonomi wilayah rendah

Bila $IW = 0,3-0,4$, artinya :

Ketimpangan ekonomi wilayah sedang

Bila $IW > 0,4$, artinya :

Ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Komponen Y sebagai penyusun rumus indeks williamson dalam penelitian ini menggunakan data informasi Hasil Produksi Sektor Pertanian dan dari BPS Kabupaten Situbondo + Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini diasumsikan sebagai salah satu data

sektor dari penyusun PDRB per kecamatan yang tersedia di BPS Kabupaten Situbondo.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan “Daerah Wisata Pantai Pasir Putih” yang letaknya diujung timur Pulau Jawa, bagian Utara dengan posisi di antara $7^{\circ}35'-7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'-114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Kabupaten Situbondo mempunyai batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur lebih kurang 150 Km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan disebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 Km² terbagi dalam 17 Kecamatan 4 Kelurahan, 132 Desa, 627 Dusun/lingkungan, 1.265 RW, dan 3.328 RT.

Hasil Analisis Indeks Williamson

Angka yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson dapat menjelaskan sejauh mana kondisi ketimpangan pendapatan disuatu wilayah. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Indeks Williamson berkisar antara 0-1. Angka indeks ketimpangan Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kecamatan tanpa menjelaskan

seberapa besar PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Situbondo yang didistribusikan dengan rata-rata PDRB daerah atau kecamatan lainnya. Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan tinggi tetapi di sisi lain ada juga daerah dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Perbedaan daerah dapat dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terpusatnya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan tidak terjadi persebaran yang merata.

Ta 6.1 1 Nilai Indeks Williamson Per Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2016

No	Kecamatan	Indeks Williamson
1	Sumbermalang	0,16
2	Jatibanteng	0,13
3	Banyuglugur	0,14
4	Besuki	0,29
5	Suboh	0,16
6	Mlandingan	0,08
7	Bungatan	0,02
8	Kendit	0,10
9	Panarukan	0,23
10	Situbondo	0,25
11	Mangaran	0,16
12	Panji	0,28
13	Kapongan	0,17
14	Arjasa	0,06
15	Jangkar	0,15
16	Asembagus	0,24
17	Banyuputih	0,12
Rata-rata Ketimpangan		0,16

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang dihitung menggunakan Indeks Williamson tahun 2016 di kabupaten Situbondo berada pada kisaran 0,02-0,29 (dengan nilai PDRB Per Kapita Kecamatan menggunakan data Hasil Produksi Sektor Pertanian dan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah (IKM)). Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panji memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih besar

dibandingkan 15 Kecamatan daerah lainnya, yaitu sebesar 0,29 dan 0,28. Indeks ketimpangan pendapatan yang dimiliki oleh Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panji tersebut dibandingkan dengan 15 kecamatan lainnya memberi gambaran bahwa pembangunan di kecamatan Besuki dan panji tidak merata, dimungkinkan karena Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panji cenderung menjadi daerah yang banyak menyerap investasi pada sektor pertanian. Dengan adanya kemampuan yang relatif tinggi dari kecamatan lainnya dalam menyerap investasi, telah membawa dampak secara agregat yakni terjadi peningkatan kesenjangan pembangunan dengan daerah (kecamatan) lain.

Secara keseluruhan nilai rata-rata Indeks williamson Kabupaten Situbondo tahun 2016 sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Situbondo termasuk kategori rendah. Gambaran hasil Indeks Williamson tersebut belum bisa dijadikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah Kecamatan Di Kabupaten Situbondo tahun 2016 karena memerhatikan komponen penyusun pendapatan per kapita di 17 kecamatan hanya menggunakan hasil produksi sektor pertanian dan nilai produksi industri kecil menengah. Namun, hasil perhitungan ketimpangan pendapatan dengan analisis Indeks Williamson bisa digunakan sebagai indikasi atau gambaran awal bahwa terjadi perbedaan di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo dari sektor pertanian dan nilai produksi industri kecil menengah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat disparitas (ketimpangan) pendapatan antar kecamatan di kabupaten Situbondo yang diukur dengan rata-rata Indeks Williamson tahun 2016 menunjukkan nilai sebesar 0,16 bahwa masih jauh dikategorikan timpang. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Situbondo masih dikatakan merata.

Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo, diantaranya:

- a. Sebaran distribusi pendapatan (hasil produksi sektor pertanian dan nilai produksi industri kecil menengah) di masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo minimal harus tetap mempertahankan Indeks Williamson 0,16 sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di tiap kecamatan tetap rendah. Dengan memerhatikan kebijakan pembangunan (pro kemiskinan) tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan sektor industri kecil menengah;
- b. Melihat dari laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami penurunan di tahun 2016, maka dengan memerhatikan lapangan usaha (pekerjaan) mayoritas penduduk Kabupaten Situbondo di sektor pertanian khususnya sebagai petani (sejumlah 100.042 orang), pemerintah daerah harus memprioritaskan pada: (a) perbaikan kualitas SDM - melalui pelatihan peningkatan kompetensi dibidang pertanian; (b) penyediaan lahan/ lapangan di desa sebagai tempat penjualan hasil pertanian; (c) pembangunan pertanian berwawasan agribisnis yang berkelanjutan; (d) pengembangan kelembagaan petani. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan pemasok kebutuhan pasar regional/domestik. Untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas dan eksistensi IKM di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan diantaranya: (a) pelatihan dan bimbingan dalam meningkatkan penjualan kepada IKM; (b) melakukan terobosan baru dalam penjualan berbasis teknologi,

misalnya dengan *e-smart IKM Kabupaten Situbondo* (menjual hasil produk karya Kabupaten Situbondo).

Daftar Pustaka

- 7 Arsyad, L. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2017. *Situbondo Dalam Angka 2017*. Situbondo.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Sjafrizal. 1997. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.undip.ac.id

Internet Source

8%

2

media.neliti.com

Internet Source

4%

3

pnpmsitubondo2.blogspot.com

Internet Source

3%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

5

ojs.unud.ac.id

Internet Source

2%

6

www.situbondokab.go.id

Internet Source

2%

7

docslide.us

Internet Source

2%

Exclude bibliography On